



# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tahun 2022 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) dipakai acuan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat dipakai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2022, LKjIP merupakan penilaian evaluasi atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang baik di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) maupun di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Besar harapan kami agar LKjIP ini dapat diterima sebagai pertanggung jawaban Kinerja, sekaligus sebagai evaluasi untuk peningkatan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana di masa-masa mendatang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini, semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Negara, 2 Pebruari 2023  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jembrana,



**Ir. I Made Yasa, M.Si.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196508161992031017

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
DAFTAR BAGAN	.....	v
KEPUTUSAN	.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	.....	1
BAB I PENDAHULUAN	.....	3
1.1 Gambaran Umum	.....	3
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi	.....	4
1.3 Isu-Isu Strategis	.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.....	10
2.1 Perencanaan Strategis	.....	10
2.2 Tujuan Dan Saran	.....	11
2.3 Penetapan Kinerja	.....	13
2.4 Rencana Kinerja	.....	13
2.5 Perjanjian Kinerja	.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	.....	21
3.2 Realisasi Anggaran	.....	24
3.3 Evaluasi Kinerja	.....	27
BAB IV PENUTUP	.....	30
A. Kesimpulan	.....	30
B. Saran-Saran	.....	30

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1..... 6  
Tabel 1. 2..... 6  
Tabel 1. 3..... 7  
Tabel 1. 4..... 7  
Tabel 1. 5..... 7  
Tabel 2.1..... 11  
Tabel 2.2..... 11  
Tabel 2.3 ..... 12  
Tabel 2.4..... 12  
Tabel 2.5..... 13  
Tabel 2.6..... 14  
Tabel 2.7 ..... 19  
Tabel 28 ..... 20  
Tabel 3.1..... 28

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1 ..... 6



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JALAN SURAPATI NOMOR 1 TELP. (0365) 41210  
N E G A R A

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 09 / KOMINFO/2022**

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan Kinerja Instansi dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana;
  - c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana.

- MENINGGAT :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (

- Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587 ), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )
  5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 )
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
No. 1842 )

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 49 Tahun 2016  
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kabupaten Jembrana.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022.

**KEDUA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) dimaksud  
dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai  
Laporan Capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam  
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Jembrana .

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara  
Pada tanggal : 2 Pebruari 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jembrana,



**Ir. I Made Yasa, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196508161992031017

**KEPUTUSAN** , ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) merupakan sebuah media pertanggung jawaban yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama 1 ( satu ) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2022 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, Program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang bisa diakses oleh seluruh stakeholders. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, sebelumnya telah menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian pula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan kedalam perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tahun 2022.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah **terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang komunikasi dan informatika yang dilandasi dengan pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia**. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah *“meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap hak untuk mendapatkan informasi, terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sosialisasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan”*.

LKjIP Tahun 2022 memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dibandingkan dengan target capaian yang diharapkan, serta hambatan yang ditemui sehingga suatu target belum tercapai selama tahun berjalan. Dimana diuraikan mengenai penjelasan alokasi dana untuk 5 (Lima) program dengan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) sub kegiatan dengan dukungan dana sejumlah Rp. 11.440.663.574,-. Realisasi belanja sebesar Rp. 10.534.998.623 dan sisa dana sebesar Rp. 905.664.951,- dengan persentase realisasi sebesar 92,08 %.

Dalam hal peningkatan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu dalam bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis infokom, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodasi kelancaran tugas.

Untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka dilakukan beberapa hal seperti memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien, menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal

kegiatan secara tepat, secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan, menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi dengan baik serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait secara efektif. Dengan demikian diharapkan dapat mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pada tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang bisa diakses luas oleh masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 GAMBARAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki arti dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja maupun membangun system manajemen kerja yang lebih baik untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi;
2. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam menjalankan pencapaian sasaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terhadap terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/ penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian system perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2021-2026 . Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi serta realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kewajiban membantu Kepala Daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
2. Pelaksana Kebijakan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;
3. Pelaksana Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
4. Pelaksana Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
5. Pelaksana Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

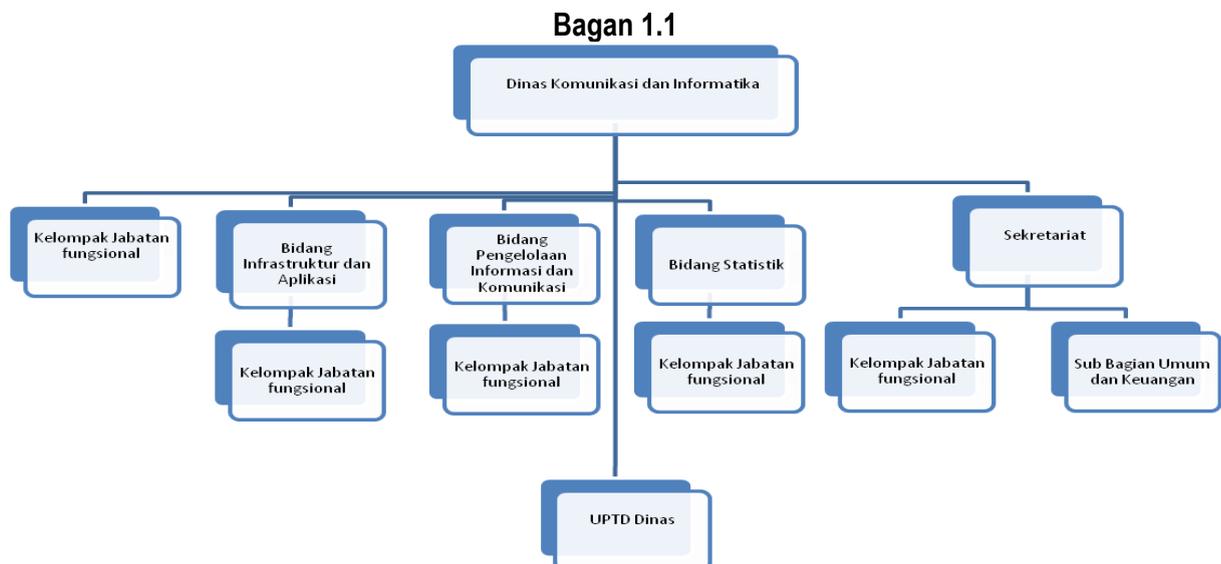
Kepala Dinas Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Merumuskan Rencana Strategis ( Renstra) Dinas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
2. Menyusun Perencanaan Pencapaian Sasaran Dinas Agar Terlaksana dengan Efektif dan Efisien;
3. Mengkoordinasikan Perencanaan, Penelitian / Pengembangan, Pengendalian/ Evaluasi dan Pelaporan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan Organisasi perangkat Daerah yang terkait agar terjalin harmonisasi pelaksanaan Tugas;
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui system Pengendalian interen agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indicator sasaran strategis yang diperjanjikan;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan Retribusi Daerah Sesuai dengan Bidang Tugasnya;
6. Menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan yang berdampak pada kegagalan pencapaian target

yang diperjanjikan;

7. Memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan organisasi perangkat Daerahserta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
8. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan merekomendasikan Kegiatan perizinan dibidang komunikasi dan Informasi;
9. Menyelenggarakan desiminasi Informasi Skala Kabupaten;
10. Menyelenggarakan pengawasan/Pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, dan warung seluler atau sejenisnya;
11. Menyelenggarakan urusan statistic lintas sektoral dan Persandian;
12. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD), dan RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS;
13. Mengkoordinasikan Penyusunan capaian kinerja Dinas dan kabupaten;
14. Menyampaikan saran dan Pertimbangan kepada Bupati tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam bidang komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian;
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan dibidang komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian;
16. Menyelenggarakan ketatausahaan dibidang komunikasi dan informatika, Staistik dan Persandian;
17. Mengkoordinasikan, Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai program kerja/ kegiatan serta ketentuan yang berlaku;
18. Memberikan petunjuk penyelesaian masalah kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan standar operasional presedur (SOP);
19. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi;
21. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada bagan berikut ini :



*Sumber :* Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut :

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945; dan
- (3) Landasan Operasional.

Dengan pembagian tugas dan pengaturan organisasi sesuai struktur di atas, maka fungsi pelayanan dan pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dapat berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur yang memadai. Berikut gambaran pegawai dengan status pegawai negeri sipil sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

**Tabel 1.1**  
**Pegawai berdasarkan latar belakang Pendidikan**

Doktor	Megister(S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	Total
-	1	19	-	4	-	24

**Tabel 1. 2**  
**Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Jabatan	Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
Struktural	-	-	5	-	-	-	5
Fungsional	-	1	13	-	-	-	14
Staf	-	-	1	-	4	-	5
							24

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

Golongan	IVd	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	TOTAL
<b>Jumlah (orang)</b>	-	-	-	5	12	-	-	4	1	1	-	1	<b>24</b>

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Orang	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
<b>Jumlah (orang)</b>	18	6	24

Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat direalisasikan tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Adapun fasilitas yang digunakan oleh SDM yang mendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 5**  
**Data Aset Yang Dimiliki**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
<b>I.</b>	<b>Aset Lancar</b>		
1.	Persediaan	25.195.130,00	22.916.690,00
<b>II.</b>	<b>Aset Tetap</b>		
1.	Peralatan dan Mesin	8.023.773.681,00	7.383.908.658,00
2.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	990.517.500,00	990.517.500,00
4.	Aset tetap lainnya	2.695.000,00	2.695.000,00
5.	Akumulasi Penyusutan	(7.419.810.495,00)	(6.631.167.523,00)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>9.016.986.181,00</b>	<b>8.377.121.158,00</b>
<b>III.</b>	<b>Aset Lainnya</b>		
1.	Aset Tak Berwujud	376.447.000,00	376.447.000,00
2.	Aset Lain-Lain	0,00	0,00
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(192.618.000,00)	(192.618.000,00)
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>376.447.000,00</b>	<b>376.447.000,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>9.418.628.311,00</b>	<b>8.776.484.848,00</b>

### 1.3 ISU STRATEGIS

Untuk tercapainya pelaksanaan tujuan, diperlukan strategi yang merupakan serangkaian manuver dan seluruh elemen sebagai serangkaian arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan/*stakeholder* (Wikipedia). Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana diantaranya :

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan *e-government*;
3. Belum Optimalnya Penyediaan Data Statistik dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
3. Pencapaian pada Tahun 2022 dengan dibuktikan adanya penghargaan yang diperoleh, baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sendiri ataupun sebagai supporting untuk perangkat daerah lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana.

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas, Potensi yang menjadi ruang lingkup perangkat daerah dan sistematika penulisan LKjIP.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, tujuan, sasaran, rencana kinerja dan perjanjian kinerja. Disajikan juga gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai,

keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2021– 2026 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Jembrana di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) termasuk pembangunan kemampuan ilmu dan teknologi untuk mewujudkan daya saing global serta penguatan daya perekonomian. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2026 dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2021– 2026, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Nomor 19/KOMINFO/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2021– 2026.

#### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana. Masing-masing tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan tersebut berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta mengacu pada Misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

##### 2.1.1 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan visi dan misi Bupati Jembrana terpilih untuk periode 2021-2026 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana melaksanakan misi nomor 6 (enam) yaitu; “Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju kota cerdas (Smart City).
- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah.

Adapun keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan urusan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Urusan RPJMD 2021-2026**

No.	Misi	Tujuan Prioritas	Sasaran	Urusan
1.	Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) menuju kota cerdas ( <i>Smart City</i> )	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan Sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 strategi dan kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan**

Visi : Mewujudkan Masyarakat Jember Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana			
Misi Keenam : Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) menuju kota cerdas ( <i>Smart City</i> )	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah.	Mendorong Pengembangan Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengupayakan sistem informasi manajemen pemerintahan yang berbasis Teknologi. Informasi/komputerisasi</li> <li>- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan Media Massa</li> </ul>

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

### 2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu atau kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan Publik;
2. Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel.

Tabel 2.3

## Tujuan dan Target Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan Publik	Persentase Jenis layanan Publik berbasis TIK yang diselenggarakan secara daring (online)	60%
2.	Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Persentase peningkatan Akuntabilitas kinerja OPD	84%

## 2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan gambaran dari apa yang hendak dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran ini merupakan tuangan spesifik atas apa yang hendak dicapai sebagai titik fokus dalam pencapaian tujuan yang nantinya akan mengarah pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diukur.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah:

1. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatnya Pengelolaan Layanan TIK;
3. Meningkatnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.

Tabel 2.4

## Sasaran Strategis dan Target Sasaran Strategis Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	70%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Layanan TIK	Prosentase Penyelenggaraan Layanan SPBE Aktif	73%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Layanan Data Statistik Sektoral	90%

### 2.2.3 Kebijakan

Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana kebijakan tersebut merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah yang dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan bagi setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam rangka mendukung kebijakan Bupati Jembrana yaitu:

1. Menciptakan Keterbukaan Informasi dan Akses Informasi kepada Masyarakat yang memerlukan;
2. Menciptakan Pengembangan layanan system e-government;
3. Menciptakan kualitas data statistik Berbasis TIK.

### 2.3 PENETAPAN KINERJA

Dalam Penetapan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 maka ditetapkan Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi masyarakat dan stakeholder yang terdiri atas indikator *output* dan *outcome* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	TARGET
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Pemeringkatan keterbukaan Informasi Badan Publik	Menuju Informatif
2.	Meningkatnya Pengelolaan Layanan TIK	Prosentase Penyelenggaraan Layanan SPBE Aktif	Jumlah Layanan SPBE aktif digunakan oleh OPD : Jumlah layanan SPBE yang dikelola di data center X 100%	72,5%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Layanan Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi : Jumlah data yang tersedia X 100%	62%

### 2.4 RENCANA KINERJA

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan

demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu pada 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana 2022

Informatika mempunyai 5 program prioritas yang terdiri dari 4 program strategis dan 1 program pendukung.

Adapun program Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana pada Tahun 2022 yang menjadi program pilihan/ strategis, dan menjadi indikator utama yaitu :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana pada Tahun 2022 yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/kota
2. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
3. Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota
5. Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi anatar perangkat daerah kaputaten/kota

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 32 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Rahun 2022 Kabupaten Jembrana Tahun 2022, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Rencana Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah		Nilai / Predikat LKjIP OPD			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai LKjIP OPD</b>	<b>83.5</b>	<b>nilai</b>	<b>4.336.869.586</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah Dokumen perencanaan Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3</b>	<b>jenis</b>	<b>11.500.000</b>

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	8	dokumen	5.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4	laporan	2.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP OPD yang tersusun	1	laporan	3.500.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah dokumen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel</b>	3	jenis	<b>3.738.185.726</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS Jumlah Insentif Pemungutan Retribusi yang dibayarkan dalam 1 Tahun	1	tahun	3.734.510.726
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan yang tersusun	13	laporan	3.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5	laporan	475.000
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi pendapatan daerah yang dilaksanakan</b>	<b>3</b>	<b>Jenis</b>	<b>4.728.000</b>
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	128	WR	1.422.000
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah penetapan wajib retribusi daerah	128	WR	1.324.000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pelaporan pengelolaan retribusi daerah	12	laporan	1.982.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sumberdaya aparatur yang kompeten</b>	30	Orang	<b>26.407.200</b>

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah sumberdaya aparatur yang kompeten	30	stel	26.407.200
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan administrasi perkantoran</b>	<b>8</b>	<b>jenis</b>	<b>299.337.050</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat penerangan dan instalasi listrik yang diadakan	2	jenis	2.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	3	jenis	32.984.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	7	jenis	11.492.750
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1	tahun	252.360.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2</b>	<b>jenis</b>	<b>48.290.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	2	jenis	2.750.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan Tenaga Administrasi	3	orang	45.540.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5</b>	<b>jenis</b>	<b>208.421.610</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas / atau kendaraan dinas Jabatan	1	unit	40.180.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	9	unit	140.241.610

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Gedung kantor yang dipelihara	28	unit	14.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih untuk pemeliharaan gedung kantor yang diadakan	10	jenis	11.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	6	unit	3.000.000
<b>Meningkatnya keterbukaan informasi publik</b>		Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik			
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>852.806.850</b>
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola</b>	<b>4</b>	<b>jenis</b>	<b>852.806.850</b>
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	15	media	431.435.850
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan	4	jenis	405.725.000
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan informasi publik	90	orang	15.646.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Prosentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>8.000.000</b>
	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Hubungan Komunikasi Sandi dan keamanan Komunikasi sandi antar perangkat Daerah yang ditetapkan</b>	<b>2</b>	<b>jenis</b>	<b>8.000.000</b>
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan sarana dan Prasarana teknologi Informasi dan komunikasi	2	jenis	8.000.000

<b>Meningkatnya pengelolaan layanan TIK</b>		Persentase system informasi OPD yang terintegrasi			
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Prosentase Aplikasi Informatika yang terintegrasi</b>	<b>73</b>	<b>%</b>	<b>5.994.198.138</b>
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub.Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Sub Domain yang dikelola</b>	<b>43</b>	<b>sub domain</b>	<b>4.561.351.038</b>
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan layanan komunikasi informasi dan media massa yang dipelihara	4	jenis	4.561.351.038
	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan e-Government yang dikelola</b>	<b>3</b>	<b>jenis</b>	<b>1.432.847.109</b>
	Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan pusat data	12	bulan	387.262.100
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola	2	jenis	829.325.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan system dan aplikasi	12	bulan	216.260.000
<b>Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral</b>		Persentase data statistik yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi oleh OPD			
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Ketersediaan data dan Metadata hasil pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Desiminasi untuk perencanaan Pembangunan</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>248.789.000</b>
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Buku Statistik Sektoral Yang tersusun</b>	<b>2</b>	<b>jenis</b>	<b>248.789.000</b>

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang tersusun	2	dokumen	218.732.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Metadata Statistik Sektoral yang	1	dokumen	30.057.000

## 2.5 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil maka perlu adanya Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022 yang merupakan Ikhtisar Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi publik	70%
2. Meningkatnya Pengelolaan Layanan TIK	Persentase Penyelenggaraan Layanan SPBE efektif	73%
3. Meningkatnya kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan Layanan Data Statistik sektoral	90%

Sumber : Data RPJMD 2021-2026

No.	Program	Sumber Anggaran (Rp.)			Jumlah (Rp.)
		DAU	PBBKB	BKK.Prop.	
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	853.223.850	-	853.223.850
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	-	5.467.957.232	504.185.000	5.972.142.232
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	223.829.000	-	-	223.829.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	8.000.000	-	-	8.000.000

**Tabel 2.8**  
**Target Perjanjian Kinerja Per Triwulan Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Indikator	Anggaran	Penanggung jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	33,61%	10,78%	17,99%	7,61%	<b>Program Informasi Dan Komunikasi</b>	Prosentase Terpenuhinya Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 853.223.850	Kadis Kominfo
			70%				<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	Prosentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 8.000.000	Kadis Kominfo
2.	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Tik	Persentase Penyelenggaraan Layanan Spbe Efektif	24,20%	20,09%	16,76%	11,95%	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	Prosentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi	Rp. 5.972.172.232	Kadis Kominfo
3.	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Layanan Data Statistik Sektoral	22,89%	6,72%	49,12%	11,28%	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	Persentase Ketersediaan Data Dan Metadata Hasil Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Dan Desiminasi Untuk Perencanaan Pembangunan	Rp. 223.829.000	Kadis Kominfo

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assesment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan tidak oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain.

Dalam Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dalam pengelolaan keuangan menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes*. Indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

Penjelasan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai diperjanjikan 3 (tiga) Sasaran yang dijabarkan dalam 5 (lima) Program , 12 (Dua Belas ) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan . Adapun 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatnya Pengelolaan Layanan TIK;
3. Meningkatnya kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral.

Pencapaian indikator sasaran strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Sasaran Strategis 1 :**  
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	90	90	90

Indikator kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik dengan terhadap perbandingan jumlah masyarakat yang mengetahui informasi publik tahun 2022 dengan target sebesar 90%, realisasi 90%, capaian kinerja sebesar 90% (kategori informatif), yang menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Informasi Publik mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 3,34%. Realisasi target indikator sasaran ini, berdasarkan Perhitungan Jumlah responden yang mengetahui informasi dibagi jumlah responden keseluruhan kali 90% ( Target).

Tahun	Jumlah Responden yang mengetahui Informasi	Jumlah Responden Keseluruhan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2022	96 orang	100 orang	90 %	90 %	90%
2021	26 orang	35 orang	90 %	75,23 %	93,34%

**Sasaran Strategis 2 :**  
Meningkatnya Pengelolaan Layanan TIK

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
2.	Persentase penyelenggaraan Layanan SPBE efektif	%	73,00	86,80	118

Indikator kinerja Persentase penyelenggaraan Layanan SPBE efektif terhadap layanan sistem informasi OPD yang terintegrasi tahun 2022 dengan target sebesar 73,00%, realisasi 86,8%, capaian kinerja sebesar 118% (kategori baik), yang menunjukkan bahwa capaian kinerja persentase system informasi OPD yang terintegrasi terhadap penyelenggaraan Layanan SPBE efektif mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 24,1%. Realisasi target indikator sasaran ini, berdasarkan Perhitungan Jumlah system informasi OPD yang terintegrasi dibagi jumlah system informasi OPD yang ada kali 73,00% (Target).

Tahun	Jumlah Sistem informasi OPD yang sudah terintegrasi	Jumlah Sistem informasi OPD yang ada	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2022	99	114	73 %	86,8 %	118%
2021	80	85	87 %	81,88 %	94,1%

### Sasaran strategis 3 :

Meningkatnya kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral

#### Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
3.	Persentase Data Statistik Yang Digunakan Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Oleh OPD	%	90	91	99,94

Indikator kinerja Persentase data Statistik yang digunakan dalam perencanaan dan Evaluasi Oleh OPD target sebesar 90%, capaian kinerja sebesar 99,94% (kategori baik), yang menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase data Statistik yang digunakan dalam perencanaan dan Evaluasi oleh OPD **meningkat** dari tahun 2021 sebesar **0,12%**. Realisasi target indikator sasaran ini, berdasarkan Perhitungan Jumlah data statistic sektoral yang digunakan OPD untuk perencanaan dan Evaluasi dibagi Jumlah data statistic sektoral yang tersedia kali 90%.

Tahun	Jumlah Data Statistic Sektoral Yang Digunakan Opd Untuk Perencanaan Dan Evaluasi	Jumlah Data Statistik Yang Tersedia	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2022	400	410	90 %	91 %	99,94%
2021	350	400	85 %	87,5 %	99,82%

## 3.2 Realisasi Anggaran

---

### **Indikator Persentase Terpenuhinya Informasi dan Komunikasi Publik**

*Program Informasi dan Komunikasi Publik*

*Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

---

#### 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah sub kegiatan yang penganggarnya untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Jembrana Radio Ananta Praja Swara dengan frekuensi 99,9 MHz sebagai sarana dalam upaya diseminasi Informasi Pembangunan Daerah, LPPL umumnya sebagai memiliki keunggulan dalam penyampaian pesan-pesan informasi melalui media dengar, serta dapat membidik halayak sasaran wilayah kabupaten Jembrana tertentu. Termasuk juga belanja tenaga jasa untuk menyiapkan bahan dan materi untuk publikasi sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan dengan cepat dan sederhana. Pada tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp. 431.435.850,- dan jumlah realisasi Rp. 380.329.745,- (88%).

#### 2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah sub kegiatan yang dianggarkan untuk keperluan sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu satu tahun kegiatan. Adapun materi sosialisasi dihimpun dari semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan semua materi kemudian dirangkum menjadi suatu bahan sosialisasi yang akan ditampilkan di berbagai media yang dimiliki meliputi:

- a. Media Publikasi berupa ; Baliho, Neonbox, Video Profil, Advetorial berita Online dan cetak, serta media online dan media sosial.
- b. Media Cetak berupa ; Spanduk Leaflet, Poster, Stiker, Banner, Booklet.
- c. Media Elektronik berupa ; Web, Facebook, Videotron, Radio FM, Youtube, Instagram dan video profil.
- d. Media calling berupa ; Pemberitahuan secara langsung ke masyarakat dengan menggunakan mobil kolling ke seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

Kegiatan ini bertujuan agar kebijakan/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah informasinya bisa langsung di ketahui dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Pada Tahun 2022 anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 405.725.000,- serta realisasi sebesar Rp. 391.817,250,- (97%).

### 3. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik adalah sub kegiatan yang dianggarkan untuk membiayai pengelolaan dan pelatihan SDM Pengelola Informasi Publik (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan target 90 orang. Sehingga target pengelolaan informasi dan penilaian pengelolaan informasi publik daerah dapat tercapai sesuai target yaitu dalam kategori informatif. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.646.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.590.000,- (80%).

---

#### **Indikator Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

*Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*

*Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota*

---

#### 1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sub kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperlukan untuk pengamanan dalam pelaksanaan komunikasi dan informasi intra pemerintah dengan target 2 (dua) Jenis dengan besar alokasi anggaran Rp. 8000.000, dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 7.700.000, (96,%).

---

#### **Indikator Persentase Penyelenggaraan Layananan SPBE Efektif**

*Program Aplikasi Informatika*

*Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub.Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

---

#### 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah sub kegiatan yang dilaksanakan untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan komunikasi Informasi dii Pemkab Jember yang terdiri dari beberapa belanja yaitu sewa bandwidth internet yang diperuntukan melayani kebutuhan internet seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember termasuk Desa Dinas dan Desa Adat. Belanja Pulsa SMS broadcast dan SMS LBA (Location Based Advertising) untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait program unggulan Pemkab Jember. Belanja pengadaan peralatan jaringan berupa IP Kamera dan jaringan fiber optic (FO) baru untuk mendukung program e- kinerja dan mesin absen. Belanja pemeliharaan system dan instalasi berupa jaringan intranet dan internet, radio/wireless/CCTV dan tower serta sarana dan prasarana NOC dan Data Center. Belanja honor tenaga kontrak dan programmer untuk mendukung kinerja pelayanan SPBE dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan indikator kinerja adalah jumlah jaringan layanan komunikasi informasi dan media massa yang dipelihara dengan target 4 (empat) jenis. Dimana total alokasi anggaran sebesar Rp 4.561.351.038,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 4.375.310.850,00 (95,92%).

**Indikator Persentase Penyelenggaraan Layananan SPBE Efektif***Program Aplikasi Informatika**Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang diperuntukan untuk belanja dan pemeliharaan Server Aplikasi, *server backup*, *router firewall*, *routermail gateway*, GSM SMS Alarm, *SSL Certificate* dan Lisensi IP Camera dan perangkat pendukung lainnya dengan tujuan untuk pengembangan dan pengelolaan pusat data dan *Network Operation Control (NOC)*. Server aplikasi digunakan untuk menunjang berjalannya integrasi system yang lebih baik. Server Backup sebagai pusat backup data agar data data tetap dapat dikembalikan ketika terhapus atau rusak (*Corrupt*) *Router firewall* berfungsi sebagai pengontrol *incoming traffic* dan *outgoing traffic* internet dan sebagai perlindungan koneksi data dan informasi di dalam lingkungan Kabupaten Jembrana. Sedangkan *Router Mail Gateway* sebagai *antispam*, *Email encryption* dan *outbound dataloss prevention*, sehingga melindungi server mail dari serangan *malware*, *spamming*, *phising* dan serangan *Dos (Denial of servis)*.

Perangkat lainnya adalah GSM SMS Alarm yang akan memberikan peringatan berupa SMS atau telepon ketika suhu di ruangan NOC naik atau tidak dingin, sehingga mampu mencegah terjadinya terjadinya kerusakan perangkat karena suhu yang panas.

Pembelian SSL Sertifikat bertujuan untuk menjaga keamanan data antar server. Jenis SSL yang dibeli adalah SSL Wildcard Domain yang dapat melindungi Site Main Domain dan banyak sub Domain sekaligus. Untuk Lisensi IP Camera digunakan sebagai kontrak untuk pemberian hak atas perangkat IP Camera yang terpasang di beberapa titik dilingkungan Kabupaten Jembrana. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 387.262.100,00 dengan jumlah realisasi Rp. 346.125.997,00 (89,38%), dengan indikator kinerja adalah Jumlah penyelenggaraan pengelolaan pusat data dengan target 12 Bulan.

**2. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kegiatan yang diadakan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator kinerja adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola dengan target 2 (dua) jenis berupa pendampingan SPBE daerah yang terdiri dari Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Operasional Penyelenggaraan SPBE yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja makan jamuan tamu, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja honorarium, personal computer untuk pelayanan e-voting dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 829.325.000,00 realisasi sebesar Rp 679.817.135,00 (81,97%).

**3. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan Program Smart City Daerah, dengan indikator kinerja jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan

pengembangan system dan aplikasi dengan target 12 Bulan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 216.260.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 193.402.000,00 (89,43%).

---

**Indikator Persentase Ketersediaan Data Dan Metadata Hasil Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Dan Desiminasi Untuk Perencanaan Pembangunan**

*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*

*Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota*

---

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral adalah kegiatan yang sepenuhnya dilaksanakan untuk mengumpulkan data-data sektoral organisasi perangkat daerah (OPD), Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jembrana dengan menggunakan metode kompilasi dokumen administrasi. Dengan adanya pengumpulan data tersebut diharapkan nantinya bidang statistik menjadi walidata untuk menuju satu data Indonesia yang sedang menunggu diterbitkannya peraturan Presiden tentang satu data Indonesia (SDI) dan menjadikan data data tersebut sebagai database atau Bank data Kabupaten Jembrana dengan **Program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD)**. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp 193.772.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 164.341.000,00 (87,24%). Indikator kinerja yaitu jumlah data dan informasi pembangunan statistik daerah sektoral Kabupaten Jembrana yang tersusun dan terkumpul dengan target adalah sebanyak 6 laporan.

2. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun data metadata dalam aplikasi Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) maupun sistem informasi data statistik sektoral Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp 30.057.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.039.900,00 (99,94%) Dengan indikator kinerja jumlah metadata statistic sektoral yang yang terbentuk dan dipelihara dengantarget 1 laporan.

### 3.3 Evaluasi Kinerja

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan

capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategik pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pencapaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan anantara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya dapat diuraikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran dan target atas pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah:

- a. Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap pegawai terhadap tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Adanya standar prosedur operasional sebagai acuan kerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
- c. Adanya situasi yang kondusif untuk menjaga etos kerja
- d. Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- e. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait

Berikut evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam realisasi program dan kegiatan Tahun 2022.

Tabel 3.1  
Anggaran Dan Realisasi Tahun 2022

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN			
			REALISASI	%	SISA	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.336.869.586,00	3.902.928.506,00	89,99	433.941.080,00	10,01
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.500.000,00	6.359.900,00	55,30	5.140.100,00	44,70
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.738.185.726,00	3.463.518.026,00	92,65	274.667.700,00	7,35

3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Kewenangan Perangkat Daerah	4.728.000,00	2.432.600,00	51,45	2.295.400,00	48,55
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.407.200,00	24.007.200,00	90,91	2.400.000,00	9,09
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.337.050,00	170.039.920,00	56,81	129.297.130,00	43,19
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.290.000,00	47.025.000,00	97,38	1.265.000,00	2,62
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.421.610,00	189.545.860,00	90,94	18.875.750,00	9,06
B	PROGRAM INFORMASI DAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	852.806.850,00	784.736.995,00	92,02	68.069.855,00	7,98
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	52.806.850,00	784.736.995,00	92,02	68.069.855,00	7,98
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	5.994.198.138,00	5.594.656.222,00	93,33	399.541.916,00	6,67
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub.Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.561.351.038,00	4.375.310.850,00	95,92	186.040.188,00	4,08
2	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.432.847.100,00	1.219.345.372,00	85,10	213.501.728,00	14,90
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	248.789.000,00	244.976.900,00	98,47	3.812.100,00	1,53
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	248.789.000,00	244.976.900,00	98,47	3.812.100,00	1,53
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	8.000.000,00	7.700.000,00	96,25	300.000,00	3,75
1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	8.000.000,00	7.700.000,00	96,25	300.000,00	3,75
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.440.663.574,00</b>	<b>10.534.998.623,00</b>	<b>92,08</b>	<b>905.664.951,00</b>	<b>7,92</b>

Dalam Tahun 2022 jumlah dana yang dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sebesar Rp 11.440.663.574,00 berupa Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 10.739.748.974,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 700.914.600,00 dengan jumlah 5 (lima) program. Realisasi Belanja tahun 2022 terbagi menjadi :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 9.908.573.886,00 dengan persentase 92,26% masih lebih kecil sebesar Rp 831.175.088,00 (7,74%) dari target sebesar Rp 10.739.748.974,00, terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai Rp 3.462.918.026,00 (92,73%) lebih kecil Rp 271.592.700,00 (7,27%) dari target Rp 3.734.510.726,00.
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 6.445.655.860,00 (92,01%) lebih kecil Rp 559.582.388,00 (7,99%) dari target Rp 7.005.238.248,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp 626.424.737,00 persentase 89,37% lebih kecil Rp 74.489.863,00 (10,63%) dari target Rp 700.914.600,00
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 626.424.737,00 (94,21%) lebih kecil Rp 38.489.863,00 (5,79%) dari target Rp 664.914.600,00.
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 0 (0,00%) tidak ada realisasi sama sekali dari target Rp 36.000.000,00.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

LKjIP yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana selama Tahun 2022, yang dilengkapi juga dengan ringkasan capaian kinerja tahun 2022. Laporan kinerja ini menggambarkan keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Kepala Daerah. Hasil LkjiP ini selanjutnya dipakai bahan Evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan penyusunan Renja Tahun 2023.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tahun 2022, merupakan laporan tahun ke dua dari pelaksanaan Perencanaan Strategis sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 2021-2026. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010.

#### B. Saran-saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Kegagalan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh kondisi *uncontertables*, seperti penganggaran pada perubahan yang waktunya singkat, untuk itu kedepan kegiatan-kegiatan yang memerlukan waktu panjang jangan dianggarkan pada anggaran perubahan.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mengatasi permasalahan.

Demikian LkjiP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2022 disusun untuk dipakai pedoman dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi organisasi selanjutnya.

Negara, 2 Pebruari 2023  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jembrana,



**Ir. I Made Yasa, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196508161992031017